

# MODEL KOMUNIKASI DAN STRATEGI KEBIJAKAN KESADARAN ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *CHARACTER BUILDING* BERBASIS LITERASI MEDIA

Gatut Priowidodo<sup>1</sup>, Yustisia Ditya Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra

<sup>2</sup>Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP), UK Petra

<sup>1</sup>[gatpri@petra.ac.id](mailto:gatpri@petra.ac.id); <sup>2</sup>[yustisia@petra.ac.id](mailto:yustisia@petra.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model komunikasi dan strategi kebijakan yang tepat khususnya dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi melalui *character building* berbasis literasi media. Obyek yang dipilih adalah organisasi penyelenggara pendidikan formal yang dikelola lembaga-lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan yakni Sekolah Kristen Petra 5 dan Sekolah Islam Attarbiyah Surabaya, dengan subjek penelitian adalah peserta didik pada *level* SMP.

Metode penelitian menggunakan paradigma interpretif/kualitatif yang dikaji berdasarkan studi *phenomenography*. Kajian ini menekankan variasi pengalaman empirik dari informan yang terlibat langsung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD (*focus group discussion*) dengan jumlah peserta 20 serta telaah kepustakaan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan bantuan NVIVO.

Hasil penelitian ini mencakup dua temuan: temuan pertama adalah tingkat pengetahuan tentang kesadaran anti korupsi melalui *character building* berbasis literasi media yang secara langsung dialami oleh para pelajar pada jenjang pendidikan menengah pertama. Serta temuan kedua model komunikasi dan strategi kebijakan yang tepat khususnya dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi melalui *character building* berbasis literasi media.

Kata kunci: Model, komunikasi, strategi kebijakan, kesadaran anti korupsi, literasi media.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find a model of communication and appropriate policy strategies particularly in growing awareness of anti-corruption through media literacy-based character building. The selected object is the organization of formal education providers run educational institutions of private religious schools namely 5 Petra Christian and Islamic Schools Attarbiyah Surabaya, the research subjects were students at the junior high level.*

*Interpretive research methods / qualitative that analyzed, based on studies phenomenon-graphic. This study emphasizes the variety of empirical experience of informants who were directly involved. Data were collected through interviews, FGD (focus group discussion) with the number of 20 participants as well as the study of literature. The data were analyzed thematically with the help of NVIVO*

*The results of this study reveal two findings: first finding is the level of knowledge about anti-corruption awareness through media literacy-based character building which is directly experienced by students in secondary education first. The second is the findings of the*

---

<sup>1</sup> Dosen dan Kepala Pusat Kajian Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra

<sup>2</sup> Dosen dan Sekretaris Pusat Kajian Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra

*two models of communication and appropriate policy strategies particularly in growing awareness of anti-corruption through media literacy-based character building.*

*Keywords: Model, communications, policy strategies, anti-corruption awareness, media literacy.*

## PENDAHULUAN

Data yang dikeluarkan *Transparency International* 2014 menunjukkan peringkat korupsi di Indonesia naik dari 114 ke 107. Tapi masih jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Indonesia mendapat skor 34, naik dari tahun lalu, 32 bersama-sama dengan Argentina dan Djibouti. Tahun 2014, Indonesia berada di peringkat 114 dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa. Sementara berdasarkan data Komisi Penanganan Korupsi (KPK) penindakan per 31 Januari 2015, KPK melakukan penyelidikan 14 perkara, penyidikan 5 perkara, penuntutan 4 perkara, inkracht 0 perkara, dan eksekusi 2 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 679 perkara, penyidikan 416 perkara, penuntutan 326 perkara, inkracht 283 perkara dan eksekusi 297 perkara. Berikut ini tabel tabulasi data penanganan korupsi tahun 2004-2015 :

**Tabel 1.1. Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) tahun 2004-2015 (per 31 Januari 2015)**

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	80	14	679
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	5	416
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	45	4	326
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	0	283
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	48	2	297

Sumber : Data Statistik [www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id)

Fakta penanganan korupsi diatas, menjelaskan bahwa problem korupsi masih menjadi persoalan yang sangat krusial, meskipun beberapa upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. Hampir seluruh aparatur pemerintah pada semua level memiliki contoh pejabat yang terlibat. Ada menteri, anggota DPR/DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota, Polri/TNI dan tidak terhitung lagi pejabat eselonnya yang lebih rendah tersandung kasus korupsi. Tentu keadaan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan upaya pencegahan. Beberapa kasus di atas adalah akibat atau kejadian yang sudah terjadi. Sebagai institusi pendidikan yang sangat mungkin dilakukan bukanlah di ranah penindakan atau pengadilan namun adalah tindakan cegah tangkal melalui transformasi nilai-nilai kebaikan publik lewat edukasi dini perilaku anti korupsi.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Montessori (2012) menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi formal adalah penting dan tidak dapat ditunda lagi. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian itu menemukan bahwa sinergi antara informasi, pengetahuan, dan moral adalah penting. Perlunya pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 dan No. 23 Th. 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nafi, (2009) dengan menggunakan metode kualitatif menemukan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan (*education approach*), hal ini dimaksudkan bahwa harus ada upaya secara preventif untuk mencegah budaya laten korupsi yang ada di Indonesia. Namun, ternyata penelitian ini menemukan bahwa selama ini kurikulum PAI belum memuat materi-materi tentang nilai-nilai antikorupsi, kontekstualisasi pendidikan Islam juga harus segera dilakukan sehingga sesuai dengan ajaran Islam yakni *Sholih likulli zaman wal makan*. (kontekstual di waktu dan dimanapun berada). Rahayu (2009) dalam penelitiannya di SMPN 8 Malang dengan menggunakan metode studi kasus menemukan bahwa perlu pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan agar materi pembelajaran berjalan efektif.

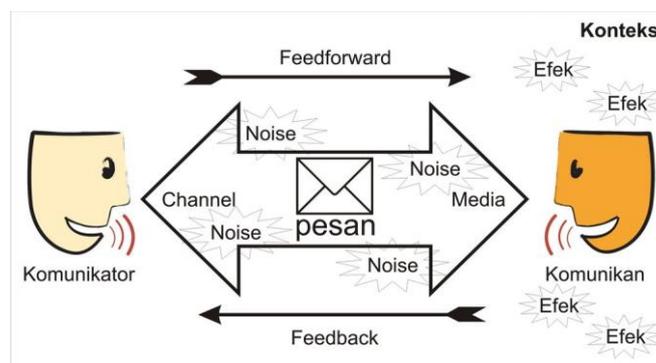
Fakta lain menunjukkan bahwa topik pendidikan anti korupsi sudah menjadi isu global dan juga menjadi perhatian beberapa peneliti di negara lain. Georgiev (2013) di Sekolah Dasar, Makedonia ditemukan bahwa anak-anak memiliki pemahaman rendah terhadap cara-cara melindungi diri dari dampak negative korupsi, meski tahu bahaya korupsi. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dimitrova (2005) pada anak-anak Sekolah Menengah Pertama di Bulgaria ditemukan ternyata mereka memiliki pengetahuan dan dampak buruk korupsi yang sangat terbatas. Penelitian tersebut merekomendasi agar dibuat kebijakan pendidikan anti korupsi yang memadai. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alexsyan (2012) menemukan bahwa sistem pendidikan di Armenia, tingkat korupsi sangat tinggi dan untuk itu perlu pembenahan agar menumbuhkan kesadaran anti korupsi.

Berangkat dari beberapa fenomena dan penelusuran hasil riset terdahulu di atas, dapat dirumuskan bahwa *research gap* dalam penelitian ini terletak pada metode yang digunakan.

## KAJIAN TEORITIS

### *Model Komunikasi*

Mempermudah visualisasi tentang aliran pesan dinatara elemen komunikasi yang terlibat dalam aktivitaskomunikasi dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Model Komunikasi  
Sumber : Zalabak, 2009

Model komunikasi di atas mendeskripsikan aliran pesan dari komunikator ke komunikan yang sangat mengandalkan media. Media menjadi instrument penting agar pesan diterima utuh dan terjadi *feedback*. Distorsi informasi dan komunikasi seringkali terjadi ketika pesan tidak

sepenuhnya dapat diterima sepenuhnya. Masalah ini menurut Mc Quail (2005) dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi media secara inovatif dan kreatif.

### ***Strategi Kebijakan***

Strategi dimaknai sebagai *as a plan, method, or series of maneuvers or stratagems for obtaining as a specific goal or result*. Kata tersebut mengacu pada kata Yunani 'strategos' yang berarti komandan militer atau jenderal yang menyampaikan 'stratos' (harafiahnya, padang rumput atau lembah yang terletak di bawah dan kiasannya, berkeah atau tentara) dan egos artinya yang melakukan atau memimpin. Glueck dan Jauch (1989:9) memberikan batasan strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Sementara menurut David (2004:15), strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture.

Pada konteks Indonesia, pendidikan karakter kesadaran anti korupsi dapat dianggap sebagai strategi penting yang memungkinkan dijalankan secara integrative dengan pendidikan formal di sekolah. Terlebih spirit UU 32 Tahun 2004 tentang Sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder. Ini artinya, jika tujuan akhir dari pendidikan merupakan tanggung jawab bersama siswa yang berkarakter dan berintegritas baik, maka iumenjadi tanggung jawab bersama yakni orangtua, sekolah dan masyarakat.

Kebijakan yang diputuskan pemerintah sekedar alat agar semua tindakan dapat dioptimalisasi fungsinya dan dapat diukur serta dievaluasi implementasinya. Terdapat sekurangnya lima jenis strategi kebijakan yakni :

**Strategi Integrasi**, pentegrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan pesaing. **Strategi Intensif**, penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan prodk yang ada hendak ditingkatkan. **Strategi Diversifikasi**, terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. **Strategi Defensif**, disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turn around) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media. **Strategi Umum Michael Porter**, menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. (David, 2004:231)

### ***Character Building***

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan, dan perilaku sebelumnya akan objek (Fishbein & Ajzen, 1973). Menurut Montessori M (2012) kesemua elemen di atas saling berhubungan dan saling bertukar tempat, misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya.

### ***Literasi Media***

Kegiatan literasi atau penyadaran masyarakat selain menjadi tanggung jawab pemerintah juga dapat melibatkan dunia perguruan tinggi. Kegiatan literasi menurut Potter (2005) awalnya hanya kegiatan yang berorientasi pada kemampuan membaca dan menulis. Tidak mengherankan orientasi awal kegiatan literasi hanya berfokus pada perilaku individu terait dengan kemampuan membaca media baik itu koran, majalah, atau bulletin dan sejenisnya. (Scribner & Cole, 1981, Sinatra 1986 in Pooter, 2005). Pada konteks Indonesia, media literasi dikaitkan dengan pendidikan karakter dalam semangat anti korupsi sangatlah relevan. Paling tidak melalui perkembangan new media sebagai instrumen pembelajaran, konten, pembelajaran yang dianggap sensitif ataupun membisankan akan semakin interaktif. Indonesia yang didera sedemikian massifnya penyakit korupsi yang kronis, sangat memerlukan langkah-langkah progresif terukur melakukan cegah tangkal agar penyakit tidak semakin akut dan imun.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *phenomenography*. *Phenomenography* adalah metode yang sangat menekankan bahwa setiap individu memiliki variasi pengalaman dan pemahaman subjek yang berbeda terhadap fenomena yang terjadi. Terlebih lagi dengan konteks dan basis ideologi pendidikan yang berbeda. Data dikumpulkan dengan wawancara dan diskusi kelompok terarah /FGD (*focus group discussion*). Analisis data dilakukan secara tematik. Uji keabsahan data dilakukan berdasarkan wawancara dari sumber atau informan lain, dalam hal ini dipilih guru kelas dan siswa-siswi dengan jumlah 20 peserta FGD.

## **HASIL ANALISIS**

Temuan penelitian ini terbagi atas lima kategori yakni pemahaman tentang korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, cara menumbuhkan kesadaran anti korupsi, model komunikasi dan hambatan menumbuhkan kesadaran anti korupsi serta strategi kebijakan dan peranan institusi dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi.

### ***Pemahaman Tentang Korupsi***

Pemahaman subyek penelitian terkait korupsi hampir sama. Ada dua cara melihatnya. Pertama secara makro dalam konteks umum. Mereka menceritakan tentang penyalahgunaan keuangan negara, merampas uang yang bukan miliknya, menggunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, untuk hidup mewah dengan tidak bekerja keras, tindakan untuk mengambil uang negara/uang orang lain tanpa adanya pemberitahuan dan sewenang-wenang untuk mementingkan diri sendiri. Kedua secara mikro dan bersifat

empirik yang dirasakan dalam keseharian mereka selaku pelajar. Mencotek pada waktu ulangan, mencuri benda milik kawannya, guru datang terlambat, siswa tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, peraturan kelas atau sekolah yang sering dilanggar, tidak membayar atau membayar kurang kalau berbelanja di kantin, termasuk jika tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru serta beberapa pelanggaran yang harus berurusan dengan guru BK (Bimbingan & Kounseling).

### ***Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Korupsi***

Secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi terbagi atas dua yakni faktor internal (diri sendiri, keluarga, adanya "selfpity" atau sikap egois yang mementingkan diri sendiri, serta keadaan ekonomi yang masih merasa kekurangan,) Sementara faktor eksternal (lingkungan tempat kerja, pergaulan, gaya hidup, keinginan memiliki uang yang lebih banyak, gengsi, ekonomi. adanya dorongan dari orang lain. Ingin terlihat mewah terhadap lingkungan sekitar, ingin dipandang sekeliling dan faktor jabatan).

### ***Cara Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi***

Adapun cara untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi dengan berbagai hal yakni; **Pertama**, harus ada ancaman bagi para korupsi, seperti yang dilakukan di luar negeri. **Kedua**, diberi hukuman yang membuat jera bagi para pelaku korupsi. **Ketiga**, membuat undang-undang tentang korupsi, **Keempat**, ketika masa pemilihan umum Presiden/Kepala Daerah, diharapkan pemilih dapat memilih pimpinan yang berpihak pada pemberantasan anti korupsi. **Kelima**, dengan membiasakan menabung di bank dengan jujur dan baik. **Keenam**, supaya bisa untuk masa depan. Serta, untuk selalu bersikap jujur.

Jika melakukan sebuah korupsi sebaiknya diberi pengarahan untuk tidak melakukannya lagi dan hukuman yang tepat. Dengan membiasakan hidup jujur (menurut kehendak Allah). Harus ada hukum yang berat agar para koruptur jera hukumnya, Termasuk ada hukuman pasung, tembak mati, atau penjara seumur hidup. Sementara pada level cegah tangkal usia dini menurut informan agar diberi pembinaan sejak dini, memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa

### ***Model komunikasi serta hambatan menumbuhkan kesadaran anti korupsi***

Diberi penyuluhan oleh lembaga anti korupsi, memberi pelajaran tentang kesadaran anti korupsi. Dengan adanya kantin kejujuran, para siswa dianjurkan untuk membayar sesuai dengan apa yang dibelinya. Pesan disampaikan melalui saluran yang tepat khususnya antara *sender* dan *receiver*. Dalam konteks pelajar Sekolah Menengah Pertama, guru memiliki peran yang dominan dalam distribusi pesan-pesan anti korupsi kepada para siswanya. Model komunikasi yang dilakukan baik di Sekolah berbasis Kristen dan Islam hampir sama, keduanya menggunakan media langsung dan tidak langsung. Media langsung melalui sisipan pelajaran moral di pelajaran PPKn (*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*) juga Agama. Sementara yang tidak langsung adalah tempelan pesan-pesan kebaikan yang ada di papan-papan pengumuman serta media sekolah.

Secara spesifik diakui para informan atau subyek penelitian bahwa kampanye anti korupsi itu sendiri belum secara terang-terangan dipublikasikan di sekolah mereka.

## ***Strategi kebijakan dan peranan institusi dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi***

Secara eksplisit, subyek penelitian menjelaskan bahwa bila kesadaran siswa belum tumbuh maka perangkat-perangkat hukum yang ada harus secara maksimal bekerja. Misalnya pada tataran nasional KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lembaga kepolisian dan kejaksaan harus membuat program khusus yang mendorong masyarakat untuk takut korupsi.

Tidak ada hambatan, karena untuk melakukan tindakan anti korupsi itu sangat mudah, terutama pada bagian keuangan. Dengan kejujuran, dan beribadah 5 waktu dan tidak mengambil hak-hak yang tak perlu dilakukan, koruptor-koruptor tersebut mestinya bisa mencegah sendiri agar tidak melakukan tindakan berkorupsi. Masalahnya, menurut informan yang rata-rata masih duduk dibangku kelas III SMP ini, mereka para pelaku korupsi itu sudah tidak malu-malu melakukan pencurian atau perampasan uang negara. Informan 2 mengatakan:

“Rasa malu itu sepertinya sudah hilang ya pak. Meskipun ditayangkan televisi sepertinya mereka malah bangga. Terlihat tertawa mereka lebar-lebar, seolah tidak merasa bersalah. Anehnya lagi, sudah tahu mereka mencuri uang rakyat... lha koq ada juga massa yang cukup banyak membela-bela mereka” ungkap Khodijah Alial Hapsi, siswi SMP Attarbiyah Surabaya.

## **DISKUSI**

Berdasarkan temuan lima kategori data di atas, sangat jelas tergambar bahwa model komunikasi dan strategi kebijakan dalam bidang kesadaran anti korupsi ini perlu dirumuskan secara tegas. Institusi pendidikan meskipun dinilai merupakan pihak yang paling strategis dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi terkesan masih belum optimal menjalankan tugas penting tersebut.

Mengapa demikian? Implementasi kebijakan kurikulum yang menitik beratkan muatan kesadaran anti korupsi belum sepenuhnya diterapkan. Tidak mengherankan dari dua sekolah yang menjadi obyek penelitian ini juga memiliki keragaman dalam menentukan sikap. Bahkan begitu kuatnya dengan tema yang peneliti pilih di atas, dua sekolah menyatakan menolak untuk menjadi obyek penelitian bertema anti korupsi ini. Meskipun pada awalnya kedua sekolah tersebut (satu berafiliasi ke Kristen dan satu lagi berafiliasi ke Islam) menerima, namun setelah mempelajari proposal yang peneliti sertakan kemudian ditolak agar tidak memilih sekolahnya sebagai obyek penelitian.

Intinya pada diskusi terkait kesadaran anti korupsi dan pembentukan karakter yang bisa mengatakan tidak kepada korupsi harus terintegrasi pada semua elemen. Institusi pendidikan memang garda terdepan khususnya dalam menyemai benih-benih pencegahan berkorupsi baik secara individual atau berjemaah, tetapi itupun harus disokong oleh kekuatan lain dalam masyarakat. Kekuatan itu bisa keluarga, institusi sosial, institusi agama, teladan para tokoh, media yang tidak serba hedonis, masyarakat yang menghargai kerja keras tidak suka pamer/ riya kekayaan serta hidup yang terukur dengan penghasilan yang diterima.

Variasi pengalaman yang diungkapkan para siswa sebagai informan penelitian ini menegaskan bahwa beragam bentuk penyimpangan uang negara harus selekasnya diakhiri. Agar apa? Agar Indonesia tidak selalu disorot sebagai negara yang serba korup. Ungkapan para siswa SMP sejatinya mengekspresikan keprihatinan mendalam melihat sosok para pejabat negara yang begitu terhormat tetapi memiliki karakter kepribadian yang rapuh, mudah silau terhadap uang yang bukan miliknya.

Kesadaran bermedia (literasi media) juga sangat menolong agar upaya cegah tangkal perilaku korup itu sejak awal sudah mulai ditanamkan kepada para pelajar di jenjang pendidikan menengah pertama ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian analisis dan diskusi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa model komunikasi dan strategi kebijakan yang berbasis lokalitas memang cukup relevan untuk memulai menumbuhkan kesadaran anti korupsi pada *level* lokal atau individual. Tetapi jika upaya tumbuhnya kesadaran itu ingin bersifat massif, harus ada kebijakan yang menstimulasi terbentuknya karakter kepribadian secara otonom bukan paksaan.

Apapun instrumen paksaan secara *ad hoc* mungkin berhasil tetapi dia tidak menjamin praktik baik (*good practice*) itu diteruskan dalam sebuah kesadaran diri. Maka pembentukan karakter (*character building*) menjadi sebuah keniscayaan agar nilai-nilai baik itu terinternalisasi secara mandiri, serta jangan terkesan dipaksakan.

## REFERENSI

- Andersson, A.&Mette J.L. (1996). *Methods. Background Phenomenography is an inductive researchorientation which originates in empirical studies*. Diakses dari [http://uk.cbs.dk/.../Andersson%20 &%20 Larsen, %20Jännes%20-%20Methods.pdf](http://uk.cbs.dk/.../Andersson%20&%20Larsen,%20Jännes%20-%20Methods.pdf)
- Aleksanyan, H. (2012). *Cases of Corruption and its Prevention in Armenian's Education System*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs (Nufi)
- Conceptions*. Saarbrucken, Germany:LAP Lambert Academic Publishing GmbH
- David, F.R. (2004). *Strategic Management: Concept and Cases*. NJ: Prentice Hall
- Dharma, B. (2004). *Korupsi dan Budaya*. Diakses dari <http://www.kompas.com> tanggal 20 Oktober 2013
- Dimitrova, NP (2005). *Introduction of Anticorruption Education in the Bulgarian Secondary Schools*, Bulgaria, Sofia: Research and Policy in Development
- Engel, J F. dkk.(1994). *Consumer Behaviour*. Orlando: The Dryden Press
- Georgiev, V (2013). *Fighting Corruption Through Education"Anti-Corruption Education Of Primary School Students" Proceeding Conference Of The States Parties To The United Nations Convention Against CorruptionFifth Session*. Panama City: SCPC <http://www.dksk.org.mk>
- Glueck, W.F & Jauch, C.R (1991) *Strategy Management and Business Policy*. New York: Mc Graw Hil, *Indeks Korupsi*. <http://www.acch.kpk.go.id>
- McQuail, D. (2005). *McQuail's mass communication theory* edition: 5. London: SAGE.
- Megawangi, R. (2007). "Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter." [http://www. xl. co. id/files/Indonesia\\_berprestasi/presentasi Ratna Megawangi, pdf](http://www.xl.co.id/files/Indonesia_berprestasi/presentasi_Ratna_Megawangi.pdf).
- Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania Open Society Fund-Lithuania (2010). *Project Preventing Corruption Through Education, Information And Consciousness-Raising*
- Montessori, M.(2012)Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah *Jurnal Demokrasi* 11 (1)

- Nafi, A. (2009) *Pendidikan Antikorupsi : Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Pai) Atas Pendidikan Antikorupsi*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/8064/>
- Pherali, T.J. (2011). *Phenomenography as a Research Strategy, Researching Environmental*. Diakses dari <http://www.sdcentras.lt/antikorpucija/en/am1.htm>
- Potter, W.J., (2005). *Media Literacy* London: Sage Publication
- Priowidodo, G. (2007). *Pendidikan Antikorupsi Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi : Solusi Cegah Tangkal Korupsi Usia Dini*. *Jurnal Humanitas* 1 (2) p12-19
- Priowidodo, G. (2008). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Perspektif Iman Kristiani Untuk Membangun Struktur Masyarakat Yang Berdaya Saing*. *Proceeding Konferensi Integrasi Iman Ilmu*. Surabaya. UK Petra
- Puspito, N.I dan Tim (2011). *Buku Pedoman Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud
- Rahayu, A.S. (2009). *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaran di SMPN 8 Malang*. Diakses dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/12533>
- Smith, L., Joseph, C., & Patrick, C.L.H. (2008). *The stability and change of trait emotional intelligence, con ict communication patterns, and relationship satisfaction: A one-year longitudinal study*. *Personality and Individual Differences*. 45.738-743.
- Taylor R. J., Carole G., L. H., & Elisabeth v E. (2007). "Communication as The Modality of Structuration" dalam Craig, RT., Heidi L.M., *Theorizing Communication Reading Across Traditions*. London: Sage
- Yi-Ting, Y., & Alison D., (2001), "The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty". *International Journal of Service Industry Management*. 12 (3). 234 – 250.
- Zalabak, S.P.S. (2009). *Fundamental of Organizational Communication, Knowledge, Sensitivity, Skills, Values*. Boston: Pearson Allyn & Bacon